

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Studi Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu mengenai permasalahan zakat dan SDGs telah dilakukan antara lain sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Beik (2009) mengenai peranan zakat dalam mengurangi kemiskinan dengan studi kasus pada sebuah lembaga zakat yaitu Dompot Dhuafa, melakukan penelitian tentang dimana dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan 50 responden yang diambil di wilayah DKI Jakarta dengan metode penghitungan kedalaman kemiskinan menggunakan metode *headcount ratio*. Metode tersebut digunakan untuk menghitung jumlah prosentase keluarga miskin yang tersebar di wilayah DKI Jakarta. Selain itu dalam penelitian ini untuk melihat seberapa besar kedalaman kemiskinan digunakan metode penghitungan rasio kesenjangan kemiskinan dan rasio kesenjangan pendapatan. Pengukuran keparahan kemiskinan yang terjadi pada penelitian ini menggunakan indeks Sen dan indeks *Foster Greer & Thorbecke* (FGT). Adapun hasil yang didapatkan yaitu zakat mempunyai kemampuan untuk mengurangi jumlah dan prosentase dari keluarga miskin, mengurangi keparahan kemiskinan dan yang terakhir zakat dapat mengurangi keparahan kemiskinan yang ada di beberapa wilayah DKI Jakarta.

Patmawati (2006) melakukan analisis terkait peran zakat dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan di wilayah Selangor, Malaysia. Penelitian

tersebut menggunakan kurva Lorenz dan indeks gini atau koefisien gini, dimana penelitian tersebut memberikan hasil bahwa dengan adanya zakat yang didistribusikan kepada mustahik di Selangor membuat 10 % masyarakat miskin menikmati 10 % kekayaan dari distribusi zakat tersebut. Sedangkan untuk 10 % masyarakat kaya sebelum adanya zakat bisa menikmati 35,97 % dari distribusi kekayaan namun setelah adanya zakat 10 % dari masyarakat kaya tersebut hanya menikmati 32 % saja. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa adanya zakat dapat mengurangi tingkat kesenjangan diantara masyarakat kaya dan masyarakat miskin, selain itu dalam penelitian ini juga membuktikan bahwa zakat dapat membantu mengurangi jumlah keluarga miskin dan mengurangi keparahan kemiskinan.

Selanjutnya penelitian dari Suprayitno, Eko, dkk (2017) yang melihat pengaruh zakat dan SDGs bagi pembangunan manusia di lima wilayah di Malaysia. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu ARDL (*Autoregressive Distributed Lag*) dengan menggunakan data IPM di 5 daerah di Malaysia dari tahun 1980 – 2009. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa zakat memberikan efek positif terhadap distribusi IPM di 5 daerah di Malaysia pada jangka pendek dan jangka panjang, hal tersebut disebabkan adanya kebijakan fiskal dari pemerintah Malaysia terkait zakat yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi dan IPM pada jangka panjang.

Murniati (2010) melakukan penelitian untuk melihat pengaruh zakat terhadap indeks pembangunan manusia dimana dalam penelitian tersebut

digunakan data primer yang diambil melalui survei dengan sampel dari BAZNAZ daerah Bogor. Penelitian tersebut menggunakan metode penghitungan nilai t - statistik, tingkat indeks pembangunan manusia individu serta tingkat kemiskinan, sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa adanya zakat yang didistribusikan di Kota Bogor mempunyai peran positif bagi peningkatan pembangunan manusia para mustahik. Hasil uji t-statistik menunjukkan bahwa pemberian zakat kepada mustahik memberikan pengaruh nyata pada tingkat pendapatannya. Begitu juga dengan nilai IPM mustahik yang mengalami peningkatan dari angka 47 sebelum distribusi zakat menjadi 49 setelah distribusi zakat. Hasil studi menunjukkan adanya penurunan pada tingkat kemiskinan mustahik berdasarkan pada empat indikator kemiskinan yang digunakan, yaitu *headcount ratio index* (H), *poverty gap index* (P1), *income gap indeks*(I), dan *Sen indeks of poverty*(P2).

Selanjutnya Ahmad (2017) telah melakukan penelitian tentang peranan zakat dalam pembangunan yang berkelanjutan, dimana penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan berbagai macam literature yang ada yang mendiskusikan tentang potensialnya zakat untuk menjawab tantangan dan permasalahan dalam pencapaian tujuan pembangunan. Hasil kajian dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa ditinjau dari sisi maqashid syariahnya zakat mempunyai potensi besar untuk menyelesaikan permasalahan utama dalam pembangunan yaitu kemiskinan, kesenjangan pendidikan dan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, serta kelaparan yang ada di dunia.

Nurzaman (2011) yang melakukan penelitian tentang zakat dan pembangunan manusia yang dihubungkan dengan analisis kemiskinan di Jakarta, dimana penelitian dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan adanya pengaruh efektifitas distribusi zakat terutama yang digunakan untuk kegiatan produktif terhadap kesejahteraan mustahiq, adapayn kesejahteraan mustahiq dalam penelitian tersebut diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) . Penelitian ini menggunakan data primer yang diambil dari 19 OPZ yang beroperasi di Jakarta, dimana pengukuran IPM dilakukan sesuai pengambilan data yang terdiri dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks pendapatan. Penghitungan dilakukan secara manual dan menggunakan rumus dari ketiga komponen yang diukur, dari hasil penelitian mendapatkan kesimpulan bahwa IPM yang diukur menggunakan sample mustahiq sebesar 77,36 dan lebih besar dari IPM Jakarta dalam skala nasional yaitu 71,76, hal tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya distribusi zakat di Jakarta maka akan meningkatkan IPM atau kesejahteraan dari mustahiq terutama dalam hal produktifitasnya.

Romdhoni & Abdul (2017), telah melakukan penelitian mengenai zakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, penelitian dilakukan untuk melihat apakah selama ini zakat yang ada di Boyolali mempunyai implikasi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi serta pengentasan kemiskinan yang ada. Penelitian tersebut menggunakan kuisisioner yang disebar di beberapa daerah di Boyolali, dimana metode yang digunakan adalah metode survei melalui

kuisoner yang disebarkan. Adapun hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya pemberian zakat produktif bagi golongan penerima zakat di daerah Boyolali dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta menurunkan angka kemiskinan di daerah Boyolali.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Azam, Nazir, dkk (2014) mengenai zakat dan pembangunan ekonomi di Pakistan, dimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah pengaruh dari zakat terhadap pembangunan ekonomi menggunakan data mikro dan makro. Adapun data mikro yang digunakan yaitu konsumsi perkapita baik dari segi makanan maupun non makanan, klasifikasi usia dan jenis kelamin serta *transfer payment* atau zakat, dimana alat analisis untuk data – data mikro menggunakan metode regresi linier berganda. Sedangkan untuk data makro yang digunakan yaitu GDP (Gross Domestik Produk) dan *transfer payment* atau zakat dengan menggunakan metode OLS, 2SLS dan GMM. Penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa secara mikroekonomi zakat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat sedangkan dari sisi makroekonomi zakat mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Pakistan.

Adapun ringkasan dari penelitian terdahulu dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Tekhnik Analisis	Hasil penelitian
1	Beik (2009)	Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika	1. kedalaman kemiskinan 2. presentase penduduk miskin 3. kesenjangan pendapatan	Headcount ratio, Indeks Sen serta FGT	Zakat mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan tingkat kedalaman kemiskinan yang ada di DKI Jakarta
2	Patmawati (2006)	<i>Economic Role of Zakat in Reducing Income Inequality and Poverty in Selangor</i>	1. Dana Zakat 2. Jumlah Penduduk Miskin 3. Indeks Gini	Kurva Lorenz, Gini Ratio dan Atkinzon Index	zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin, mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di Selangor
3	Suprayitno, dkk (2017)	<i>Zakat & SDGs: Impact Zakat on Human Development in The Five State of Malaysia</i>	1. Total penghimpunan dana zakat 2. IPM	ARDL (Autoregressive Distributed Lag)	Zakat memberikan dampak positif terhadap distribusi IPM di 5 daerah di Malaysia dalam jangka pendek maupun jangka panjang
4	Murniati (2010)	Pengaruh Zakat Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Kemiskinan Mustahiq: Studi Kasus Pendayagunaan BAZNAZ Bogor	1. Dana zakat 2. <i>headcount ratio index</i> 3. <i>poverty gap index</i> 4. <i>income gap indeks</i> 5. <i>Sen indeks of poverty</i>	Pengujian t statistik	zakat berperan positif dalam peningkatan pembangunan manusia mustahiq pada BASNAZ Kota Bogor, serta adanya penurunan tingkat kemiskian dari mustahiq

5	Ahmad (2017),	<i>Role of Zakat in Sustainable Development Goals</i>		penelitian deskriptive dengan mengambil beberapa literature yang ada	Dilihat dari sisi maqashid syariah zakat mempunyai potensi besar dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan seperti kemiskinan, pendidikan, pertumbuhan ekonomi serta kelaparan.
6	Nurzaman, (2011)	<i>Zakat and Human Development: An Ampirical Analisis on Poverty Alleviation in Jakarta, Indonesia</i>	1. Distribusi dana zakat	penghitungan IPM	Adanya distribusi zakat di Jakarta maka akan meningkatkan IPM atau kesejahteraan dari mustahiq terutama dalam hal produktifitasnya
			2. Indeks kesejahteraan mustahiq (IPM)		
7	Romdhoni & Abdul, (2017)	Zakat dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	1. pendayagunaan zakat produktif	regresi sederhana	Adanya pemberian zakat produktif bagi golongan penerima zakat di daerah Boyolali dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta menurunkan angka kemiskinan di daerah Boyolali
			2. pertumbuhan ekonomi		
			3. kesejahteraan mustahiq		
8	Azam, Nazir, dkk (2014)	<i>Zakat and Economic Development: Micro and Macro Level Evidence from Pakistan</i>	Variabel mikro:	OLS. 2SLS. GMM	1. Zakat mempunyai dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dari sisi mikro
			1. Zakat		
			2. Jenis kelamin dan usia		
			3. konsumsi		2. Zakat mempunyai pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Pakistan dari sisi makro
			Variabel makro:		
			1. Zakat		
2. GDP					

Berdasarkan ringkasan penelitian terdahulu yang telah tertera maka keunikan dari penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian mengenai potensi zakat bagi pencapaian SDGs memang dilakukan dengan mengambil 4 komponen dari 17 target pencapaian SDGs dimanadalam penelitian sebelumnya misalnya Suprayitno, Eko, dkk (2017) hanya menggunakan komponen HDI dari 5 wilayah di Malaysia. Selain itu objek penelitian ini mengambil 34 Provinsi di Indonesia dan belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Lebih lanjut, dari sudut pandang metode analisis yang dilakukan, penelitian ini menggunakan metode analisis data panel VECM yang memperhatikan hubungan antara variable dari sisi jangka panjang dan jangka pendeknya serta hubungan antara lag pada tahun sebelumnya. Sedangkan pada penelitian – penelitian sebelumnya Beik (2009) menggunakan headcount ratio, Patmawati (2006) menggunakan *Lorenz Curve* dan Koefisien Gini, Suprayitno, Eko,dkk (2017) menggunakan metode analisis ARDL, Murniati (2010) menggunakan pengujian t-statistik dan Shaikh, Ahmad (2017) menggunakan analisis deskriptive dengan berbagai macam studi literature.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Sustainable Development Goals (SDGs) dan Potensi Zakat di Indonesia

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan sebuah program lanjutan dari Millenium Development Goals (MDGs) yang dicanangkan oleh PBB pada tanggal 25 September 2015 yang mempunyai satu tujuan yaitu pembangunan yang

berkelanjutan. Adapun terdapat 17 program unggulan yang dicanangkan oleh PBB dan disepakati oleh negara Negara di dunia yaitu sebagai berikut:



Sumber: Laporan BAZNAS, 2017

Gambar 2.1 Tujuh Belas Tujuan SDGs

Dari gambar tersebut terlihat bahwa terdapat 17 program unggulan dari PBB terkait *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang oleh PBB ditargetkan keberhasilannya pada tahun 2030. Adapun ke tujuh belas program tersebut yaitu penghapusan kemiskinan, penghapusan kelaparan, kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, pendidikan yang berkualitas, adanya kesetaraan gender, tersedianya air bersih dan sanitasi yang mencukupi, energy yang bersih dan terjangkau oleh masyarakat, tercapainya pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak, infrastruktur yang tangguh, industry inklusif dan inovatif, penurunan kesenjangan diantara masyarakat, kota yang inklusif dan berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana, pelestarian

dan pemanfaatannya yang berkelanjutan bagi ekosistem laut, pelestarian dan pemanfaatan yang berkelanjutan bagi ekosistem darat, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kokoh, serta kemitraan untuk semua tujuan pembangunan berkelanjutan. Pencapaian dari SDGs dapat dikatakan sebagai pencapaian dalam skala nasional dari suatu negara yang mencakup keberlanjutan dalam bidang ekonomi maupun lingkungan. Agenda dari SDGs tersebut tentu saja membutuhkan sumber pendanaan yang baik dari negara – negara yang melakukannya, salah satu sumber pendanaan domestik terutama bagi negara – negara dengan penduduk muslim yang tinggi yaitu melalui zakat atau pemberian filantropi.

Zakat merupakan salah satu hal wajib bagi kaum muslimin sebagai salah satu sarana untuk berbagi dengan muslim lainnya yang membutuhkan. Zakat banyak digunakan oleh lembaga – lembaga penghimpun dan pendistribusian zakat sebagai salah satu sumber dana pembiayaan program – program pemberdayaan masyarakat yang masuk dalam 8 golongan penerimanya. Pengumpulan dan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh organisasi – organisasi tertentu mempunyai tujuan yaitu untuk mensejahterakan dan memberikan keadilan bagi masyarakat yang memang mempunyai hak atas zakat tersebut. Hal ini tentunya sejalan dengan tujuan dari PBB melalui program SDGs yang telah dicanangkan, dimana di Indonesia sendiri potensi penghimpunan zakat dalam negeri yang besar mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar. Potensi pendanaan zakat untuk keberhasilan program SDGs tersebut menjadikan zakat dan SDGs

menjadi irisan yang saling berhubungan terutama dalam hal mencapai tujuan dari SDGs lewat program – program penyaluran zakat yang biasanya digunakan untuk pembiayaan sektor produktif, kesehatan, pendidikan dan pengentasan kemiskinan (BAZNAS, 2017).

Potensi zakat dalam memberikan peranan strategis dalam pendanaan pencapaian program dari SDGs ini juga didukung oleh adanya Undang – Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menyebutkan bahwa zakat merupakan salah satu pranata keagamaan yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Dari pasal tersebut dapat diinterpretasikan bahwa irisan zakat dan SDGs memang sangat erat dan bukan hanya sebatas penanggulangan kemiskinan namun juga dapat ikaitkan per poinnya dalam SDGs karena keseluruhan poin mempunyai tujuan untuk kesejahteraan dan keadilan bagi manusia (BAZNAS, 2017).

2.2.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan merupakan salah satu hal terpenting dalam suatu negara dimana selama ini proses pembangunan diidentikkan dengan pembangunan ekonomi padahal terdapat salah satu hal yang paling penting untuk mencapai pembangunan di bidang ekonomi tersebut yaitu pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan itu sendiri sebenarnya dapat diukur dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan sektoral dan pendekatan regional, adapun untuk

pendekatan sektoral yaitu pembangunan yang memusatkan perhatiannya kepada kegiatan sektor – sektor tertentu yang ada di suatu wilayah sedangkan untuk pendekatan wilayah yaitu pembangunan yang dilihat dari interaksi berbagai kegiatan dari setiap sector yang ada dalam suatu wilayah atau ruang (Iryanto, 2006). Pembangunan ekonomi di suatu daerah dapat diukur menggunakan salah satu parameter berupa angka yang disebut dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau sering juga disebut *Human Development Index* (HDI). IPM merupakan salah satu angka yang mengukur seberapa dampak kinerja pembangunan yang ada di suatu wilayah terutama dilihat dari sisi pendidikan, harapan hidup dan standar hidup layak (Melliana dan Zain, 2013). Rumusan penghitungan nilai IPM dapat dilakukan dengan menggunakan rumus berikut (Latuconsina, 2017):

$$\text{IPM} = 1/3 (\text{indeks angka harapan hidup}) + 1/3 (\text{indeks pendidikan}) + 1/3 (\text{indeks daya beli})$$

Pada dasarnya IPM lebih digunakan untuk mengetahui kualitas penduduk di suatu wilayah yang dilihat dari beberapa aspeknya, dengan tingginya kualitas sumber daya manusia yang ada di suatu wilayah maka pembangunan ekonomi akan meningkat pula. Dalam 17 program unggulan dari PBB yang tertuang dalam SDGs maka IPM menjadi salah satu hal yang penting dan menjadi perhatian karena menyangkut kualitas dari sumber daya manusia yang tentu saja menjadi indikator keberhasilan pembangunan di suatu wilayah pula. IPM sebagai salah satu komponen pada program PBB yaitu SDGs tentu saja harus digerakkan oleh sumber daya yang

besar sehingga dapat menunjang keberhasilan pembangunan manusia itu sendiri yang ditandai adanya peningkatan nilai IPM pada suatu wilayah, dimana dapat dikatakan bahwa nilai IPM yang tinggi pada suatu wilayah maka tinggi pula kualitas dari sumber daya manusianya. Sumber penggerak dari pembangunan manusia yang saat ini sedang berkembang bahkan di negara seperti Indonesia adalah zakat, dimana di Indonesia potensi zakat yang besar tentu saja dapat digunakan untuk mendorong peningkatan nilai IPM di Indonesia. Peran zakat dalam pembangunan manusia saat ini tidak dipungkiri karena adanya tiga dimensi pokok dari zakat yaitu dimensi spiritual personal, dimensi sosial dan dimensi ekonomi (Beik, 2009). Dengan adanya zakat yang disalurkan kepada masyarakat yang memang masuk ke dalam 8 golongan yang ditentukan tentu saja dapat meningkatkan produktifitas dari orang tersebut sehingga meningkatkan pula etos kerja yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan perekonomian dari setiap individu yang berhak menerimanya.

2.2.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pada suatu negara baik itu negara berkembang maupun negara maju pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu faktor utama penentu keberhasilan baik dari sisi kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter dari negara tersebut, dimana pertumbuhan ekonomi juga menjadi salah satu faktor penentu kesejahteraan dari masyarakat di negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi secara sederhana merupakan suatu proses kenaikan output per kapita suatu negara dalam jangka

panjang (Boediono, 1992). Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah dari kedua sisi yaitu dari output total dan dari jumlah penduduk, sehingga analisa yang dilakukan dalam pertumbuhan ekonomi haruslah menganalisa keduanya bukan hanya salah satu saja. Jika kita merujuk pada kasus suatu negara biasanya yang digunakan untuk menganalisa pertumbuhan penduduk adalah *Gross Domestic Product* (GDP) namun jika kita merujuk pada suatu wilayah berupa Provinsi maka analisis pertumbuhan ekonomi menggunakan nilai Produk Domestik Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi mempunyai beberapa cara penghitungan yaitu menggunakan penghitungan cara pengeluaran, cara produksi dan cara pendapatan

Pada penelitian ini untuk menganalisa pertumbuhan ekonomi suatu daerah menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi yaitu PDRB dimana PDRB dapat memberikan gambaran kemampuan dari suatu daerah dalam mengelola sumber dayanya baik sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya. Kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber dayanya tentu saja berbeda – beda dimana terdapat daerah dengan nilai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan terdapat daerah dengan nilai pertumbuhan ekonomi yang rendah hal tersebut salah satunya dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia maupun alam yang dimiliki juga berbeda – beda pula. Adanya perbedaan tersebut tentunya menimbulkan ketimoangan antar daerah terutama dari sisi perekonomian, maka dari itu Indonesia sebagai salah satu negara dengan mayoritas penduduk muslimnya mempunyai satu potensi besar untuk mendukung perekonomian masyarakat dan daerah melalui

zakat. Zakat merupakan salah satu alat yang sangat potensial yang dapat digunakan untuk memecah permasalahan ketimpangan yang terjadi di dalam masyarakat baik di daerah tersebut maupun antara daerah yang maju dan tertinggal. Adanya zakat yang didistribusikan kepada masyarakat tentunya akan meningkatkan daya beli dari masyarakat sehingga akan mendorong adanya peningkatan dalam produktifitas dari barang dan jasa, dimana secara umum peningkatan tersebut akan meningkatkan pula kapasitas produksi dan pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi skala nasional (Romdhoni, 2017).

2.2.4 Kemiskinan

Setiap negara yang ada di dunia pasti mempunyai satu permasalahan dalam perekonomiannya yaitu terkait dengan kemiskinan, tak terkecuali negara Indonesia sebagai salah satu negara berkembang. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan serius bagi setiap negara karena ketika suatu negara mengalami kegagalan dalam menangani permasalahan tersebut maka akan muncul permasalahan lainnya di bidang social ekonomi dan politik di dalam masyarakat negara tersebut. Maka dari itu pemerintah di setiap negara tak terkecuali Indonesia berupaya keras untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan dengan berbagai macam kebijakan yang diambil. Definisi kemiskinan sendiri menurut beberapa lembaga atau ahli berbeda – beda dimana Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) mendefinisikan kemiskinan dilihat dari angka pada garis kemiskinan yang menunjukkan kebutuhan minimum dari seseorang, kebutuhan minimum per orang

menurut BPS 2100 kalori perkapita perhari ditambah dengan kebutuhan pokok lainnya yaitu sandang, papan, sekolah, transportasi dan lain sebagainya. Sedangkan Bappenas (2004) mendefinisikan kemiskinan yaitu masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya (Purwanto, 2007).

Permasalahan kemiskinan yang terjadi hampir di seluruh negara di dunia menjadi perhatian besar dari Persatuan Bangsa – Bangsa (PBB), dimana PBB memasukkannya ke dalam 17 tujuan dari pembangunan berkelanjutan yang dicaangkan yaitu dalam SDGs. Seiring berkembangnya ekonomi islam salah satu instrument filantropi Islam yang dilirik untuk memecahkan permasalahan tersebut adalah dengan menggunakan zakat. Zakat yang didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan dasarnya juga sekaligus dapat dijadikan sebagai modal usaha kecil, dimana dengan begitu zakat akan memegang peranan penting dalam perekonomian suatu bangsa (Romdhoni, 2017). Zakat juga dapat digunakan untuk mendistribusikan pendapatan agar merata di setiap daerah yang ada. Adanya zakat tentu saja selain untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat kurang mampu juga dapat dijadikan modal usaha untuk memproduksi barang atau jasa sehingga dapat dijadikan sumber mata pencaharian masyarakat. Selain zakat yang didistribusikan tersebut dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu meningkatkan pula nilai jual sumber daya manusia untuk mencari pekerjaan

dan penghidupan yang layak. Pengentasan kemiskinan melalui zakat tentu saja akan berhasil jika terdapat kesinambungan dalam pendistribusian dan pedayagunaan zakat yang dilakukan oleh pemerintah sehingga dapat meningkatkan pula pendapatan dan perekonomian masyarakat kurang mampu.

2.2.5 Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)

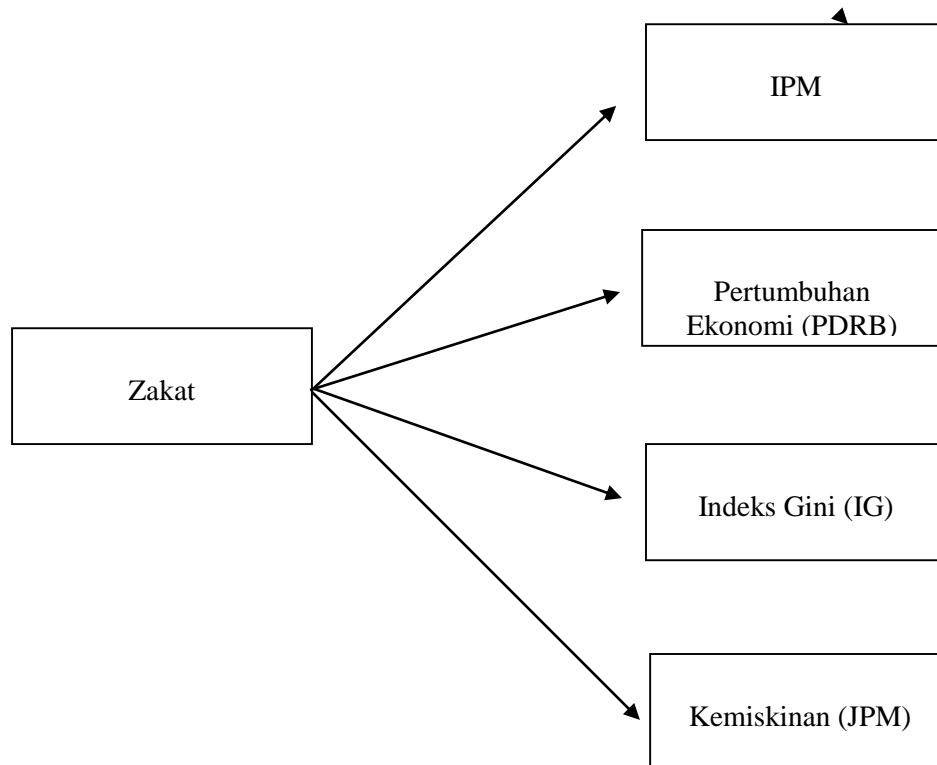
Salah satu agenda yang ada dalam 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang di canangkan PBB dalam SDGs adalah menyelesaikan permasalahan ketimpangan yang ada di tengah masyarakat suatu negara. Ketimpangan menjadi salah satu permasalahan dlam pembangunan ekonomi si setiap negara, dimana dengan adanya pembangunan ekonomi memungkinkan terjadinya perubahan struktur suatu negara dari struktur agraris ke struktur industry sehingga kegiatan perekonomian akan semakin beragam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketimpangan pendapatan merupakan perbedaan distribusi pendapatan atau kekayaan yang ada diantara penduduk di suatu wilayah yang menyebabkan ketidakmerataan pembangunan (Tiara, 2016). Adanya peningkatan pendapatn perkapita di suatu daerah biasanya tidak serta merta juga terjadi keseimbangan dalam pemerataan distribusi pendapatan, hal tersebut dikarenakan di negara – negara berkembang sering mengedepankan penggunaan modal daripada tenaga kerja sehingga kue perekonomian hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat. Salah satu cara untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan yang ada di suatu negara atau daerah

adalah menggunakan indeks gini atau *gini ratio*. Indeks gini merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk melihat ketimpangan melalui ukuran angka yang berkisar dari 0 (nol) sampai 1 (satu), angka 0 berarti terjadi pemerataan sempurna dan angka 1 artinya terjadi ketimpangan yang sempurna (Saraswati dan Chrisamba, 2016).

Indonesia sebagai salah satu negara dengan mayoritas muslim dalam melaksanakan tujuan pembangunannya tentu tidak terlepas dari permasalahan ketimpangan pendapatan tersebut. Salah satu yang sedang berkembang dan menjadi potensi besar dalam menyelesaikan permasalahan tersebut adalah mencari sumber pendanaan bagi masyarakat tidak mampu melalui distribusi zakat mengingat Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Pendistribusian zakat dapat mengurangi ketimpangan pendapatan karena pendapatan didistribusikan dari si kaya kepada si miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, selain itu dana zakat juga dapat dijadikan modal usaha kecil sehingga dapat menghasilkan pendapatan bagi masyarakat kurang mampu.

2.3 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut:



2.4 Hipotesis

1. Diduga Zakat berpengaruh positif terhadap IPM di Indonesia.
2. Diduga Zakat berpengaruh negative terhadap Kemiskinan di Indonesia.
3. Diduga Zakat berpengaruh positif terhadap pendapatan perkapita di Indonesia.
4. Diduga zakat berpengaruh negative terhadap gini ratio di Indonesia.